



## Lagi, Dewan Serang Ahok

### Bentuk Pansus LHP BPK Tahun Anggaran 2014

SEPERTI yang sudah-sudah, ketika mendapatkan celah menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kalangan DPRD DKI Jakarta mulai menggebu-gebu. Padahal hasil Pansus Hak Angket yang jelas-jelas menyimpulkan bahwa Ahok bersalah. Namun kalangan politisi di Kebon Sirih tak mampu melanjutkannya ke Pansus Hak Menggunakan Pendapat (HMP).

Kini giliran dewan mulai bersemangat dengan mempersiapkan serangan ke Ahok lewat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran APBD 2014 yang disinyalir banyak dengan kelemahan, dan berujung pada penyematian opini 'Wajar Dengan Pengecualian' (WDP).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana ditunjuk sebagai ketua pansus dan langsung merumuskan masalah yang harus diselesaikan. Ia menegaskan, terdapat enam temuan masalah dalam LHP BPK yang akan menjadi prioritas pansus. "Jadi nanti kita undang semua pihak terkait, mulai dari PT nya, wagub dan dinas pajak sampai, semuanya terjadwal. Jadi kita akan prioritas ke 6 temuan, dengan memberikan rekomendasi kepada BPK, yang melaporkan BPK" beber dia.

Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, enam temuan LHP-BPK yang akan menjadi prioritas kerja pansus akan mengerucut pada rekomendasi DPRD DKI Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, keenam temuan tersebut sudah menjadi indikasi kerugian negara yang statusnya lebih tinggi dari pada potensi kerugian negara.

"Dari istilah BPK sendiri, ada 2 indikasi kerugian negara atau potensi. Ini indikasi lebih tinggi indikasi kerugian negara, sebesar Rp 191 miliar, tetapi ada kemungkinan meningkat Rp 480 miliar," kata dia.

Dia menegaskan, kerja pansus bersifat mendorong dalam memberikan rekomendasi BPK. Apabila nantinya dalam penyelidikan harus diserahkan kepada penegak hukum, maka rekomendasi pansus akan berakhir. "Kita hanya mendorong, nanti kalau diteruskan ke hukum nanti BPK yang melakukan,"

ungkap Sani. Ia mengaku optimis Pansus LHP-BPK tidak akan berakhir seperti panitia hak angket yang hanya berhenti di paripurna tanpa mengakomodir rekomendasi panitia hak angket untuk ditindaklanjuti pada tahap Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Dirinya menganggap pansus itu berbeda dengan panitia hak angket. Saat itu, DPRD yang menginvestigasi. Sementara untuk pansus tersebut, BPK yang akan menyelidiki. "Sejauh ini kita optimis lah, mudah-mudahan gak seperti HMP," tambah dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto berharap agar kalangan dewan tidak 'masuk angin' terus-terusan dalam menangani setiap persoalan. "Jangan seperti yang sudah-sudah. Awalnya saja, gaungnya terdengar seantero negeri, tapi berakhir dengan tutup mulut. Padahal politisi harus mempertanggungjawabkan secara moral kepada pemilihnya," pungkask dia. (pes)

#### FOKUS KERJA PANSUS

- Masalah kerjasama aset di Mangga Dua
- Pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras
- Masalah Pemberian Modal Pemerintah pada PT Transjakarta
- Masalah penyerahan aset Imbreng
- Masalah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
- Masalah kelebihan pembayaran premi asuransi



Sejauh ini kita optimis lah, mudah-mudahan gak seperti HMP".

**TRUIWISAKSANA**

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta